



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 281 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 543);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Thaun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1605);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a BAB I PENDAHULUAN
- b BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
- c BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal **8 Juli 2025**

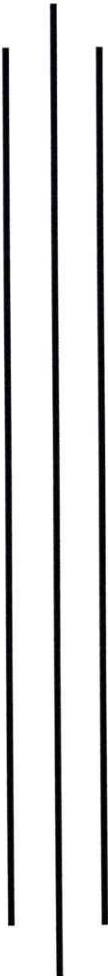
WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHMAD



LAMPIRAN XXVI : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 281 TAHUN 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH DINAS BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS
BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR TAHUN 2025



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025



DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KOTA BATAM

Jl. Ir Sutami No.1 Sekupang - Batam Telp. (0778) 323256

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Rencana Kerja Perubahan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun 2025 dapat terselesaikan.

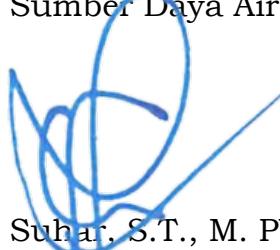
Rencana Kerja Perubahan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun 2025-2029.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun 2025, semoga Renja Perubahan ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Batam, 01 Juli 2025

Kepala Dinas Bina Marga dan
Sumber Daya Air Kota Batam,



Suhar, S.T., M. PWK.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740316 200003 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
 BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025.....	 4
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025.....	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	12
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	 14
 BAB IV PENUTUP	 23

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 s/d Triwulan I.....	5
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun 2025 s.d Triwulan I.....	12
Tabel 3.1. Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja PD).

Sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah. Renja PD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, dalam rangka panduan untuk mencapai kinerja pelayanan masyarakat yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun 2025 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau: (7,44/2021);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau: 6,39/2023);

9. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 211 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Walikota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 35).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sesuai penjabaran dari Rancangan Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun 2025-2029, sesuai tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian terhadap prioritas Pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah;
2. Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun 2025 dan sebagai dasar penentuan Perubahan KUA dan PPAS, serta perubahan RKA Tahun Anggaran 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- | | |
|---------|--|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| | 1.1. Latar Belakang |
| | 1.2. Landasan Hukum |
| | 1.3. Maksud dan Tujuan |
| | 1.4. Sistematika Penyusunan |
| BAB II | EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 |
| | 2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 |
| | 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah |
| | 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah |
| BAB III | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH |
| BAB IV | PENUTUP |

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Proses pembangunan erat kaitannya dengan proses evaluasi. Eluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Rencana Kerja (Renja) tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya.

Realisasi Rencana Strategis Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realiasasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan di lingkungan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam sampai dengan triwulan 1, dapat disampaikan bahwa saat ini sedang dilakukan persiapan pelaksanaan pekerjaan seperti persiapan perencanaan, proses penyediaan pelaksana dan proses pelaksanaan pekerjaan. Sehingga hal ini berdampak kepada pencapaian target kinerja program dan kegiatan. Program dan Kegiatan pelaksanaan pekerjaan untuk pekerjaan fisik belum dapat dihitung karena masih *on progress*.

Pencapaian target kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan akan mengalami peningkatan pada triwulan berikutnya. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa pekerjaan yang sudah selesai pelaksanaannya.

Pengukuran pencapaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2025 sampai dengan triwulan I di lingkungan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 s/d Triwulan I

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100%	25%	25
1.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	22,71%	22,71
1.03.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	190 Orang/ Bulan	90 Orang/Bulan	47,37
1.03.01.2.02.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1.03.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaiian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaiian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	0%	0
1.03.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-	0
1.03.01.2.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	-	0
1.03.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	6,56%	6,56

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1.03.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	0
1.03.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	-	0
1.03.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	0,07 Paket	3,5
1.03.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	-	0
1.03.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	-	0
1.03.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1,95 Laporan	16,25
1.03.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	0%	0
1.03.01.2.07.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	-	0
1.03.01.2.07.0003	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	19 Unit	-	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1.03.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	93 Unit	-	0
1.03.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	137 Unit	-	0
1.03.01.2.07.0009	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-	0
1.03.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100
1.03.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100
1.03.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100
1.03.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	8,48%	8,48
1.03.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100
1.03.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	32 Unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1.03.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	232 Unit	-	0
1.03.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	-	0
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase penanganan lokasi abrasi pantai dan Persentase normalisasi saluran untuk penanganan banjir	86% dan 100%	14,63%	14,63
1.03.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang abrasi pantai yang ditangani dan jumlah lokasi saluran yang dinormalisasikan	100 m dan 33000 m	4827,9 m	14,63
1.03.02.2.01.0117	Sub Kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,173 Km	-	0
1.03.02.2.01.0093	Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	33 Km	8,21 Km	24,88
1.03.02.2.01.0081	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	33 Km	0,6 Km	1,82
1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang drainase yang ditangani	83%	11,99%	14,45
1.03.06.2.01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase yang ditangani	62650 m	15573 m	24,86
1.03.06.2.01.0030	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	13 Dokumen	-	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1.03.06.2.01.0029	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	12 Sistem Drainase Perkotaan	-	0
1.03.06.2.01.0024	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	15 Sistem Drainase Perkotaan	-	0
1.03.06.2.01.0028	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	3 Sistem Drainase Perkotaan	-	0
1.03.02.2.01.0081	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	16 Sistem Drainase Perkotaan	4,26 Sistem Drainase Perkotaan	26,63
1.03.06.2.01.0026	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	1 Unit	-	0
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Percentase panjang jalan yang Ditangani	84%	4,75%	5,65
1.03.10.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang Ditangani	38.98 km	6,3 Km	16,16
1.03.10.2.01.0029	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	7 Dokumen	-	0
1.03.10.2.01.0043	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya	917,5 km	-	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1.03.10.2.01.0032	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Yang Dibangun	3,968 km	-	0
1.03.10.2.01.0041	Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	6,441 km	-	0
1.03.10.2.01.0033	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	13,121 km	-	0
1.03.10.2.01.0034	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	5,950 Km	-	0
1.03.10.2.01.0046	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	30 Km	6,3 Km	21
1.03.10.2.01.0040	Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	4 Jembatan		
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pengujian yang dilakukan	83%	18,19%	21,92
1.03.11.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel yang di uji	10 sampel	2 Sampel	20
1.03.11.2.02.0012	Sub Kegiatan Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	0,18 Layanan Informasi	18
1.03.11.2.02.0015	Sub Kegiatan Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	-	0
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1. 2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase lampu PJU yang Ditangani	83%	18,20%	21,93
2.15.02.2.01	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LL AJ Kabupaten/Kota	Persentase jumlah dokumen yang disusun	84%	0%	0
2.15.02.2.01.0001	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LL AJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LL AJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	0
2.15.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah lampu PJU yang ditangani	16628 tiang	3459 Tiang	20,80
2.15.02.2.02.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	-	-	0
2.15.02.2.02.0004	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	16478 Unit	3459 Unit	21,41

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam berdasarkan indikator yang telah ditetapkan yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi.

Adapun indikator yang berkaitan dengan kinerja pelayanan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, meliputi :

1. Persentase Jalan dan Kondisi Mantap;
2. Persentase Titik Banjir yang Ditangani.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun 2025 sampai dengan Triwulan 1, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun 2025 s.d Triwulan I

No	Indikator Kinerja Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025		Realisasi/Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025 Triwulan I		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persentase	89,5	Persentase	89.06	
2	Persentase titik banjir yang ditangani (42 titik banjir sebagai baseline)	Persentase	73	Persentase	52.23	
3	Persentase pemenuhan fasilitasi layanan keuangan dan administrasi penunjang, perencanaan dan evaluasi kinerja dinas	Persentase	100	Persentase	25	

Berdasarkan tabel di atas, masing-masing indikator kinerja mengalami progres/perkembangan yang cukup baik. Pada triwulan 1 ini, pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan penunjang indikator masih dalam tahap pengerjaan dan persiapan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pemenuhan kebutuhan akan infrastruktur yang berkualitas, adalah salah satu faktor penentu pencapaian keberhasilan pembangunan, dan yang paling penting memperhatikan faktor peningkatan kualitas lingkungan hidup dan masyarakat. Untuk itu diperlukan pendekatan pembangunan yang bersifat beberapa dimensi, yaitu pembangunan yang bersifat spasial (*regional and urban planning*), yang didukung perencanaan yang matang sesuai dengan tingkat kebutuhan, prioritas, perkembangan ekonomi dan sosial serta ketersediaan infrastruktur suatu wilayah. Dengan demikian pembangunan infrastruktur ke Bina Margaan dan Sumber Daya Air

akan dapat mendukung pengembangan ekonomi dan wilayah secara efisien dan efektif.

Beberapa isu strategis yang menjadi fokus perhatian kami adalah peningkatan kualitas dan ketersediaan jalan dan kelengkapan jalan dan jembatan, serta pengendalian banjir. Untuk menjalankan program-program tersebut, perlu adanya dukungan dari Pemerintah Daerah. Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 memberi pengaruh besar terhadap Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sendiri. Meskipun terjadi pemangkasan anggaran, beberapa program strategis tetap dapat dijalankan. Hal ini karena didukung oleh anggaran yang berasal dari pengalihan hasil efisiensi yang ditujukan untuk mendukung program-program prioritas tersebut.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan Rencana Kerja Perubahan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam pada Tahun 2025 didasarkan pada hasil evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025.

Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang mengalami perubahan (penambahan/pengurangan/pergeseran), yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - a. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai
 - Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
 - a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
 - Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
 - Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan
 - Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase

4. Program Penyelenggaraan Jalan
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
 - Sub Kegiatan Pembangunan Jalan
 - Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menambah Lajur
 - Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
5. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi
6. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - a. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LL AJ Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LL AJ

Untuk usulan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 secara lengkap, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1. Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan
Pagu Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Prgram (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM						370.527.191.972,00	289.062.991.410,00	(81.464.200.562,00)	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						339.883.790.222,00	253.419.349.900,00	(86.464.440.322,00)	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						339.883.790.222,00	253.419.349.900,00	(86.464.440.322,00)	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	Indeks Pelayanan Keskretariatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	100%	89	65.202.830.888,00	53.428.359.650,00	(11.774.471.238,00)	
				Nilai SAKIP Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air		71				
1.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan	Kegiatan Administrasi Keuangan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase Pegawai yang Menerima Layanan Administrasi Keuangan	100%	100%	16.562.001.388,00	23.172.802.150,00	6.610.800.762,00	
1.03.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	190 Orang/Bulan	190 Orang/Bulan	16.562.001.388,00	22.993.222.150,00	6.431.220.762,00	
1.03.01.2.02.0002	-	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	1 Dokumen	0,00	179.580.000,00	179.580.000,00	
1.03.01.2.05	Kegiatan Administrasi Keppegawaiannya Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keppegawaiannya Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keppegawaiannya Perangkat Daerah yang terlaksana	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	100%	100%	902.411.000,00	33.465.000,00	(868.946.000,00)	
1.03.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkappannya	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkappannya	-	1 Paket	-	72.011.000,00	0,00	(72.011.000,00)	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
1.03.01.2.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	3 Orang	830.400.000,00	33.465.000,00	(796.935.000,00)	
1.03.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	100%	1.132.504.700,00	589.191.700,00	(543.313.000,00)	
1.03.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	70.105.000,00	51.571.000,00	(18.534.000,00)	
1.03.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	497.352.100,00	245.602.700,00	(251.749.400,00)	
1.03.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	153.383.600,00	16.543.000,00	(136.840.600,00)	
1.03.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	2 Paket	-	72.184.000,00	0,00	(72.184.000,00)	
1.03.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	-	1 Dokumen	-	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	
1.03.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	332.280.000,00	275.475.000,00	(56.805.000,00)	
1.03.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan	100%	100%	43.764.015.000,00	27.649.192.000,00	(16.114.823.000,00)	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
1.03.01.2.07.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	-	3.711.024.000,00	0,00	(3.711.024.000,00)	
1.03.01.2.07.0003	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	19 Unit	13 Unit	32.595.006.000,00	26.877.544.000,00	(5.717.462.000,00)	
1.03.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	93 Unit	50 Unit	268.665.000,00	201.307.000,00	(67.358.000,00)	
1.03.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	137 Unit	26 Unit	2.520.482.000,00	570.341.000,00	(1.950.141.000,00)	
1.03.01.2.07.0009	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-	4.668.838.000,00	0,00	(4.668.838.000,00)	
1.03.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang Sesuai Perencanaan	100%	100%	1.608.052.800,00	1.155.944.800,00	(452.108.000,00)	
1.03.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	718.280.000,00	434.830.000,00	(283.450.000,00)	
1.03.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	889.772.800,00	721.114.800,00	(168.658.000,00)	
1.03.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan Berfungsi Dengan Baik	100%	100%	1.233.846.000,00	827.764.000,00	(406.082.000,00)	
1.03.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	65.470.000,00	66.760.000,00	1.290.000,00	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
1.03.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	32 Unit	774.332.000,00	443.600.000,00	(330.732.000,00)	
1.03.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	76 Unit	180 Unit	272.090.000,00	195.450.000,00	(76.640.000,00)	
1.03.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	121.954.000,00	121.954.000,00	0,00	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Persentase penanganan lokasi abrasi pantai dan Persentase normalisasi saluran untuk penanganan banjir	Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air yang Tertangani	86% dan 100%	86% dan 100%	16.275.509.960,00	12.257.692.340,00	(4.017.817.620,00)	
1.03.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang abrasi pantai yang ditangani dan jumlah lokasi saluran yang dinormalisasikan	Saluran, Kanal Banjir dan Embung yang Ditangani	100 m dan 33 Km	100 m dan 33 Km	16.275.509.960,00	12.257.692.340,00	(4.017.817.620,00)	
1.03.02.2.01.0117	Sub Kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	-	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	-	0,173 Km	-	2.706.748.000,00	0,00	(2.706.748.000,00)	
1.03.02.2.01.0093	Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	33 Km	33 Km	7.649.613.560,00	6.990.529.040,00	(659.084.520,00)	
1.03.02.2.01.0081	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	33 Km	33 Km	5.919.148.400,00	5.267.163.300,00	(651.985.100,00)	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Persentase panjang drainase yang ditangani	Persentase Sistem Drainase yang Tertangani	83%	83%	91.239.443.604,00	38.211.917.692,00	(53.027.525.912,00)	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
1.03.06.2.01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase yang ditangani	Jumlah Sistem Drainase yang Ditangani	62650 m	62650 m	91.239.443.604,00	38.211.917.692,00	(53.027.525.912,00)	
1.03.06.2.01.0030	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	13 Dokumen	17 Dokumen	1.500.000.000,00	1.697.000.500,00	197.000.500,00	
1.03.06.2.01.0029	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	12 Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	5 Sistem Drainase Perkotaan	41.340.243.000,00	6.040.261.000,00	(35.299.982.000,00)	
1.03.06.2.01.0024	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	15 Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	6 Sistem Drainase Perkotaan	24.041.641.000,00	5.793.460.000,00	(18.248.181.000,00)	
1.03.06.2.01.0028	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	3 Sistem Drainase Perkotaan	2 Sistem Drainase Perkotaan	1.906.098.000,00	529.755.000,00	(1.376.343.000,00)	
1.03.02.2.01.0081	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	16 Sistem Drainase Perkotaan	16 Sistem Drainase Perkotaan	3.296.995.604,00	5.212.975.192,00	1.915.979.588,00	
1.03.06.2.01.0026	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	19.154.466.000,00	18.938.466.000,00	(216.000.000,00)	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Persentase panjang jalan yang Ditangani	Persentase Panjang Jalan yang Tertangani	84%	84%	166.464.429.180,00	149.320.851.068,00	(17.143.578.112,00)	
1.03.10.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang Ditangani	Panjang jalan yang Ditangani	38,98 Km	38,98 Km	166.464.429.180,00	149.320.851.068,00	(17.143.578.112,00)	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
1.03.10.2.01.0029	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	7 Dokumen	13 Dokumen	683.658.500,00	1.828.813.000,00	1.145.154.500,00	
1.03.10.2.01.0043	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya	917,5 Km	1234,9345 Km	775.341.700,00	825.302.700,00	49.961.000,00	
1.03.10.2.01.0032	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Yang Dibangun	Panjang Jalan Yang Dibangun	3,968 Km	11,25 Km	26.308.368.830,00	24.530.106.276,00	(1.778.262.554,00)	
1.03.10.2.01.0041	Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	6,441 Km	10,67 Km	55.390.280.625,00	68.206.081.210,00	12.815.800.585,00	
1.03.10.2.01.0033	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	13,121 Km	8,04 Km	52.491.743.925,00	48.298.293.786,00	(4.193.450.139,00)	
1.03.10.2.01.0040	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	5,950 Km	-	15.570.211.000,00	0,00	(15.570.211.000,00)	
1.03.10.2.01.0046	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	30 Km	30 Km	9.132.824.600,00	5.393.054.096,00	(3.739.770.504,00)	
1.03.10.2.01.0040	Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan / Pelantar	Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan / Pelantar	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jumlah Jembatan yang Dibangun	4 Jembatan	1 Jembatan	6.112.000.000,00	239.200.000,00	(5.872.800.000,00)	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Persentase pengujian yang dilakukan	Persentase Pekerjaan Jasa Konstruksi yang Dilakukan Uji Mutu	83%	83%	701.576.590,00	200.529.150,00	(501.047.440,00)	
1.03.11.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel yang di uji	Jumlah Sampel yang Diuji	10 sampel	10 Sampel	701.576.590,00	200.529.150,00	(501.047.440,00)	
1.03.11.2.02.0012	Sub Kegiatan Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Sub Kegiatan Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	267.719.590,00	200.529.150,00	(67.190.440,00)	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
1.03.11.2.02.0015	Sub Kegiatan Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Sub Kegiatan Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	-	433.857.000,00	0,00	(433.857.000,00)	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						30.643.401.750,00	35.643.641.510,00	5.000.239.760,00	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						30.643.401.750,00	35.643.641.510,00	5.000.239.760,00	
1. 2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase lampu PJU yang Ditangani	Persentase PJU Dalam Kondisi Baik	83%	83%	30.643.401.750,00	35.643.641.510,00	5.000.239.760,00	
2.15.02.2.01	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase jumlah dokumen yang disusun	Persentase Jumlah Dokumen yang Disusun	84%	84%	98.000.000,00	141.000.000,00	43.000.000,00	
2.15.02.2.01.0001	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3 Dokumen	98.000.000,00	141.000.000,00	43.000.000,00	
2.15.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah lampu PJU yang ditangani	Jumlah PJU yang Ditangani	16628 Tiang	16371 Tiang	30.545.401.750,00	35.502.641.510,00	4.957.239.760,00	
2.15.02.2.02.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	-	214 Unit	0,00	6.157.000.000,00	6.157.000.000,00	
2.15.02.2.02.0004	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terhabilitasi dan Terpelihara	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terhabilitasi dan Terpelihara	16478 Unit	16157 Unit	30.545.401.750,00	29.345.641.510,00	(1.199.760.240,00)	

BAB IV **P E N U T U P**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun 2025-2029 dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam merupakan bahan perencanaan dan acuan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan I.

4.1. Catatan Penting

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan terkait pekerjaan umum, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun 2025, maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya Renja ini, maka :

1. Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun Anggaran 2025;
2. Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025.

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD